

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor perekonomian di era globalisasi saat ini semakin maju dan berkembang. Hal tersebut juga diiringi dengan berkembangnya praktik – praktik kejahatan atau kecurangan di perekonomian. Secara umum, kecurangan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh internal organisasi maupun eksternal organisasi dan mempunyai tujuan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri ataupun kelompoknya dan merugikan pihak lain. Risiko terhadap fraud atau kecurangan dapat dialami oleh setiap organisasi baik sektor swasta maupun sektor pemerintah tanpa terkecuali. Beberapa tahun ini salah satu kasus fraud atau kecurangan yang sering terjadi adalah korupsi. Kasus korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai macam kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta keyakinan masyarakat (*abuse of power*) (Saputra, 2018). *Transparency International Indonesia* (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada pada skor 37 dengan ranking 102 dari 180 negara dan skor ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 (Ramadhan, 2021).

Korupsi perlu disikapi dengan serius serta diberantas karena sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ada banyak cara untuk memberantas korupsi namun cara yang dinilai paling efektif adalah

*whistleblowing*. Partisipasi dalam sistem *whistleblowing* dapat menjadi respon untuk memberikan informasi tentang indikasi korupsi (Marliza, 2018). Menurut Alwi & Helmayunita (2020), *Whistleblower* yaitu individu (yang sedang bekerja atau sudah tidak bekerja dalam organisasi) yang melaporkan informasi untuk umum atau pada manajemen puncak mengenai mengenai indikasi perilaku kecurangan / korupsi (*illegal*).

Ada beberapa kasus korupsi di Indonesia yang sudah menggunakan *whistleblowing* untuk membongkar kasus kecurangan tersebut. Seperti yang baru – baru ini terjadi, awal tahun 2021 kasus suap pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak terbongkar karena ada yang melaporkan hal tersebut ke WISE yang merupakan *whistleblowing system* milik Kementerian Keuangan yang diluncurkan tahun 2011 (Hendartyo, 2021). Selain melalui aplikasi WISE, DJP juga menyediakan saluran untuk melakukan pelaporan tindak kecurangan yaitu [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) yang dapat oleh pegawai DJP di seluruh cabang maupun masyarakat umum. Dengan terbongkarnya kasus suap pajak melalui aduan WISE, Sri Mulyani tetap memotivasi masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan dugaan pelanggaran karena identitas *whistleblower* sangat dirahasiakan dan dijamin keselamatannya, selain itu pelaporan tersebut dapat membantu negara untuk mengungkap dalang dibalik kerugian negara. Kasus korupsi sangat sering terjadi diberbagai kalangan karena kegiatan tersebut sudah “mendarah daging” di benak masyarakat Indonesia. Banyak orang lain yang mengetahui kecurangan tersebut tapi lebih memilih diam daripada melaporkannya. Banyak faktor atau

dampak yang membuat orang ragu untuk melaporkan kecurangan tersebut dan membiarkan kegiatan tersebut berlangsung lebih lama.

*Whistleblowing* memang tidaklah mudah untuk dilakukan, karena adanya resiko negatif yang bisa menimpa *whistleblower*. Personel Kelompok Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Evi Laila Kholis mengatakan bahwa berlimpah saksi peristiwa korupsi yang dikriminalisasi serta diancam. Maka KPK kerap melindungi jati diri para saksi (Satrio, 2020). Selain itu sekarang para *whistleblower* juga di fasilitasi dengan adanya web untuk mengungkapkan informasi terindikasi kecurangan melalui <https://wbs.jatengprov.go.id/>. Web ini dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan masyarakat untuk menyuarakan laporan dugaan tindak pidana yang sedang terjadi yang menyangkut pegawai serta individu lain di suatu organisasi dimana pelapor bukan bagian dari pelaku kejahatan itu. Di dalam web ini hal – hal yang dilaporkan meliputi apa perbuatan yang berindikasi pada korupsi / pelanggaran yang diketahui, siapa saja yang terlibat, dimana tempat terjadinya, kapan waktu kejadian itu dilakukan, bagaimana modus korupsi atau kecurangannya serta dilengkapi dengan adanya bukti – bukti seperti data, foto, dokumen, rekaman yang mendukung. Pelapor juga tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan identitasnya karena web ini akan merahasiakan dan melindungi identitas pelapor sebagai *whistleblower* sehingga para *whistleblower* bisa lebih merasa aman dan tidak terdiskriminasi.

Menurut Alwi & Helmayunita (2020) seorang *whistleblower* melakukan *whistleblowing* di dasari oleh adanya keinginan untuk mengungkapkan perbuatan



seseorang atau kelompok yang melanggar aturan. Tanpa adanya niat maka sikap *whistleblowing* tidak akan terlaksana. Pada *Theory Planned of Behavior* (Teori Perilaku Terencana) dipaparkan jika perilaku untuk bertindak pasti didasari oleh niat untuk melakukan perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Saat individu menentukan sikap untuk melakukan tindakan *intention whistleblowing*, maka individu tersebut akan menilai bahwa sikap yang dilakukannya itu memiliki konsekuensi yang positif terhadap lingkungannya. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, perilaku menjadi salah satu variabel yang berdampak pada ketertarikan perilaku seseorang. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan *whistleblowing*, namun sikap dari individu itu sendiri menjadi kunci untuk menjadikan dirinya seorang *whistleblower* atau tidak.

Niat individu melancarkan *whistleblowing (intention whistleblowing)* adalah bentuk keseriusan, tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan. Saat individu hendak melaporkan kecurangan maupun tindakan yang melanggar hukum, individu percaya bahwa ia menjalankan perihal positif yang berniat bermanfaat kepada pihak lain, organisasi, pelapor (*whistleblower*) serta menolong seluruh pihak untuk bertekad melaporkan kecurangan yang terjadi pada organisasi Algadri et al. (2019). *Whistleblowing* dapat diartikan sebagai tindakan yang mengungkapkan atau melaporkan adanya tindakan ilegal atau tindakan yang melanggar etika yang dilakukan oleh anggota organisasi lainnya, kepada pihak yang berwenang dalam organisasi melalui saluran pelaporan organisasi (Iskandar & Saragih, 2018). *Whistleblower* juga diartikan sebagai seseorang yang mengungkapkan ke khalayak umum maupun ke pejabat yang memiliki kuasa

mengenai perkiraan tidak jujur, aksi melanggar hukum serta kelalaian yang ada di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta maupun pada perusahaan (Primasari & Fidiana, 2020).

*Whistleblowing* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi *whistleblowing* adalah persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku adalah ketika seseorang merasa yakin bahwa persepsi yang dimiliki atau diyakini merupakan hasil kontrol terhadap dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut (Damayanthi et al., 2017). Persepsi kontrol perilaku dapat berbeda pada setiap individu tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan karena faktor persepsi kontrol perilaku terhadap *whistleblowing* merupakan kemauan atau keinginan individu itu sendiri untuk melakukan *whistleblowing*. Penelitian Damayanthi et al. (2017) dan Djaja (2020) menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.

Faktor kedua yang mungkin mempengaruhi *whistleblowing* adalah *personal cost of reporting*. *Personal cost of reporting* didefinisikan sebagai pandangan pegawai suatu organisasi terhadap risiko pembalasan atau sanksi dari anggota organisasi, seperti manajemen, atasan, atau rekan kerja yang dapat mempengaruhi minat pegawai untuk melaporkan tindakan *wrongdoing* (Hanif & Odiatma, 2017). Risiko pembalasan yang terjadi dapat berbentuk tidak berwujud (*intangible*), seperti penilaian kinerja yang tidak adil, hambatan kenaikan gaji, pemutusan kontrak kerja karena tindakan tersebut mungkin merupakan langkah – langkah yang diambil organisasi untuk melemahkan proses pengaduan, mempersulit

*whistleblower*, pencemaran nama baik, dan bentuk diskriminasi lainnya. (Winardi, 2013) juga menambahkan bahwa keputusan menjadi pelapor dianggap sebagai tindakan tidak etis, misalnya melaporkan kecurangan atasan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena menentang atasan.

Faktor ketiga yang mungkin mempengaruhi *whistleblowing* adalah tingkat keseriusan kecurangan. Tingkat keseriusan kecurangan yaitu tingkatan hebatnya keseriusan kecurangan yang bisa mencelakakan organisasi. Tenaga kerja yang mengamati adanya kemungkinan kecurangan biasanya akan melakukan niat pelaporan (Rahmadani, 2018). Hal ini dapat diartikan bahwa makin besar tingkat keseriusan kecurangan yang berlangsung, makin besar juga niat individu untuk mengungkapkan kecurangan itu, agar tidak semakin memperbesar masalah / kecurangan. Tetapi pandangan setiap individu organisasi kepada tingkat kecurangan bisa saja berlainan.

Faktor keempat yang mungkin mempengaruhi *whistleblowing* adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkah laku yang melibatkan tiga tabiat yakni rasa pengenalan pada misi organisasi, rasa berperan serta atas kewajiban organisasi serta rasa *loyal* kepada organisasi. Tenaga kerja yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi pasti loyal, acuh dengan organisasinya, menjaga organisasinya dan tidak takut untuk melaporkan prediksi kecurangan yang terjadi untuk menjaga organisasi tersebut (Nurdianti & Ilyas, 2019). Ketika individu mempunyai komitmen organisasi yang besar, individu ini berpihak kepada organisasi (*loyal*) dan niat individu akan semakin tinggi bila menemukan adanya kesalahan atau kecurangan di dalam organisasinya, karena







individu pasti tidak akan mau organisasinya memiliki reputasi yang buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Dewi (2019), Nurkholis (2015), dan (Marliza, 2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.

Faktor kelima yang mungkin mempengaruhi *whistleblowing* adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dan organisasi dengan standar etika dan profesional yang mencakup tanggung jawab kepada klien maupun masyarakat (Garman, 2006). Profesionalisme mencerminkan sikap terhadap perilaku. Sehingga seseorang yang memiliki profesionalisme yang baik cenderung memiliki keyakinan yang tetap apapun situasinya dan akan selalu menaati aturan yang berlaku karena percaya bahwa pekerjaan yang sedang ia jalani adalah pekerjaan yang baik untuk dirinya. Menurut Nur (2019) kriteria profesionalisme ada tiga, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Dewi (2019) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.

Faktor keenam yang mungkin mempengaruhi *whistleblowing* adalah sensitivitas etika. Menurut Shaub (1989) sensitivitas etika adalah kemampuan untuk mengetahui masalah – masalah etis yang terjadi. Sensitivitas individu mempengaruhi seseorang yang profesional dalam berperilaku etis dan mengambil

keputusan. Semakin tinggi sensitivitas individu semakin tinggi pula kecenderungan menganggap *whistleblowing* ssebagai suatu hal yang penting. Sensitivitas etika juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi dan pengalaman pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Dewi (2019) menyatakan bahwa sensitivitas etika berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pemilihan variabel independen. Penelitian sebelumnya milik Prayogo (2020) menggunakan sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku sebagai variabel independen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, *Personal Cost of Reporting*, Tingkat Keseriusan Kecurangan, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, dan Sensitivitas Etika terhadap *Intention Whistleblowing*”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Persepsi Kontrol Perilaku berpengaruh positif terhadap *Intention Whistleblowing* ?

2. Apakah *Personal Cost of Reporting* berpengaruh positif terhadap *Intention Whistleblowing* ?
3. Apakah Tingkat Keseriusan Kecurangan berpengaruh positif terhadap *Intention Whistleblowing* ?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap *Intention Whistleblowing* ?
5. Apakah Profesionalisme berpengaruh positif terhadap *Intention Whistleblowing* ?
6. Apakah Sensitivitas Etika berpengaruh positif terhadap *Intention Whistleblowing* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.
2. Mengetahui apakah *personal cost of reporting* berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.
3. Mengetahui apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.
4. Mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.
5. Mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap *intention whistleblowing*.



6. Mengetahui apakah sensitivitas etika berpengaruh positif terhadap *intentionn whistleblowing*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi

Menjadi masukan referensi untuk penelitian selanjutnya serta meningkatkan ilmu pengetahuan.

- b. Bagi peneliti berikutnya

Menjadi masukan referensi teruntuk pihak yang akan melanjutkan penelitian ini dan menambah wawasan tentang auditing, terutama tentang whistleblowing.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kanwil DJP Jateng I

Hasil penelitian ini bisa dipakai untuk menilai karyawan mengenai faktor yang bisa diterapkan untuk mendorong individu atau anggota organisasi agar bisa melakukan whistleblowing.

- b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi akar informasi bagi mahasiswa khususnya jurusan ekonomi dan bisnis untuk dipakai dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

- c. Bagi pustaka akuntansi

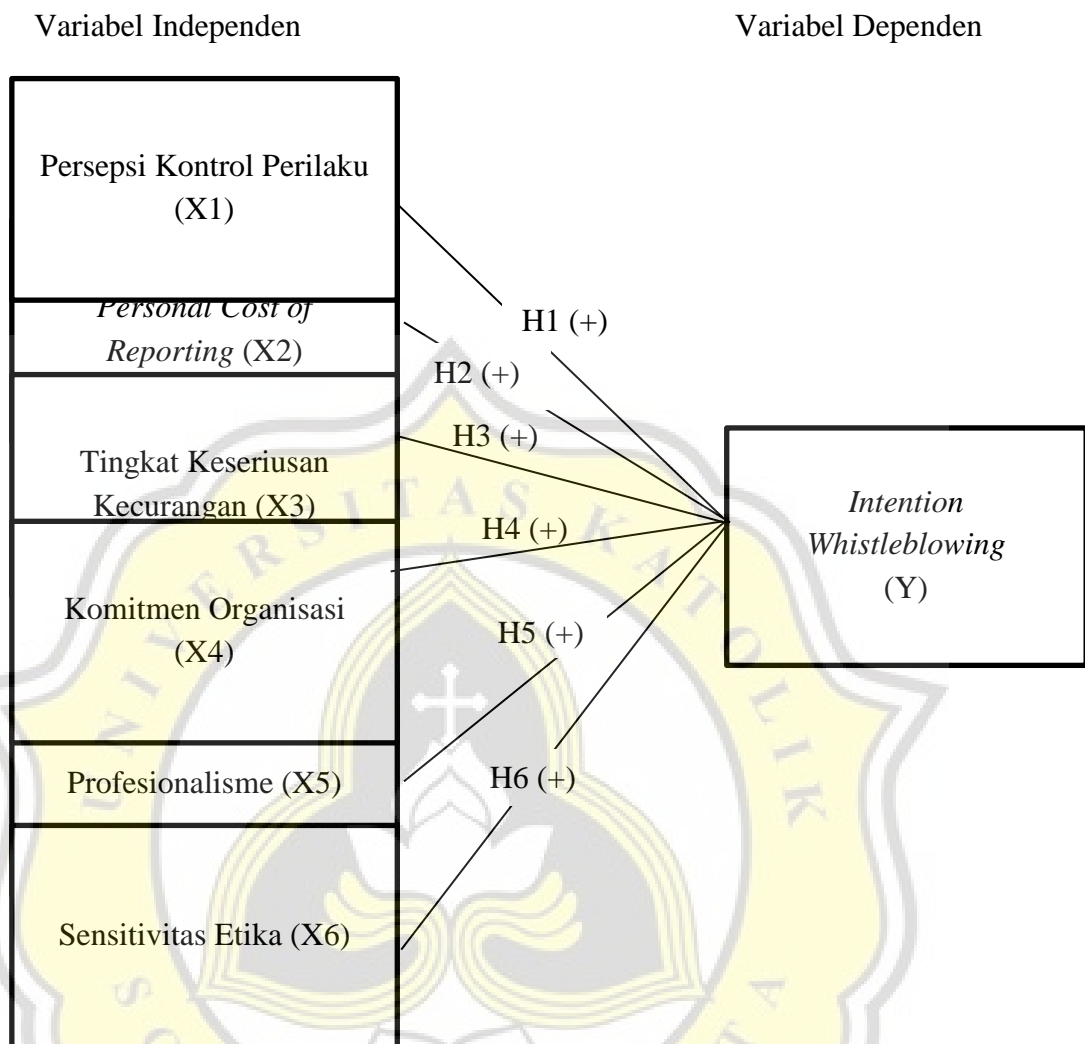
Selain berguna bagi banyak pihak, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah koleksi perpustakaan akuntansi yang ada.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini berfaedah agar memperkaya ilmu peneliti mengenai bagaimana pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, *Personal Cost of Reporting*, Tingkat Keseriusan Kecurangan, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, dan Sensitivitas Etika terhadap *Intention Whistleblowing* pada Kanwil DJP Jateng I.

### 1.5 Kerangka Pikir

*Whistleblowing* merupakan salah satu cara yang efektif yang dapat membantu mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Penting juga bagi organisasi untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi *intention whistleblowing* sehingga dapat merancang sistem pelaporan yang dapat mendorong anggotanya menjadi *whistleblower* jika menemukan kecurangan dalam organisasi tersebut. Penelitian ini akan meneliti pengaruh persepsi kontrol perilaku, *personal cost of reporting*, tingkat keseriusan kecurangan, komitmen organisasi, profesionalisme, dan sensitivitas etika dengan didukung oleh Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned of Behavior*). *Whistleblowing* merupakan salah satu tindakan terencana karena tindakan tersebut disebabkan oleh niat agar bertindak demikian.



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

## 1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan penelitian.

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.





**BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori memuat tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memuat tentang objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable, serta metode analisis data.

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Hasil dan analisis memuat tentang analisa serta penguraian berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

**BAB V PENUTUP**

Penutup memuat tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

